

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta.

David Kairipuan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenata Media Group, Jakarta.

Dhaniswara K. Hajono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dudu, Duswara, Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.

Gustav, Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruth, and Dabin*, Translated by: Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge.

Hartono, Sri Rejeki, dkk, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co: St. Paul Minnesota.

Ida Bagus Rahmadi, Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, WW Norton & Company, New York.

_____, 1975, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Matanggui, Junaiyah H, 2013, *Bahasa Indonesia untuk bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*, Grasindo, Jakarta.
- Marbun, Rocky, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Bahasa Hukum & Perundang-Undangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- O. Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK , Jakarta.
- Raimond Lamandasa, 2010, *Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Redaksi Tangga Pustaka, 2008, *UUD 1945 & Perubahannya*, PT. Tangga Pustaka, Jakarta.
- Ridwan, H.R, 2013, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa, Sembiring, 2007, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supancana, IBR, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, The
Indonesia Netherlands Nasional Legal Reform Program (NLRP),
Jakarta.

Tim Penyusun, 2013, *Buku Panduan Program Studi Magister Ilmu Hukum
UGM Kampus Jakarta Tahun 2014*, UGM, Jakarta.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2013, *Naskah Amandemen Lengkap UUD
1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia teori
dan temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal bidang penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang pedoman dan tatacara perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Aceh.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065 / 970 / 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor 067 / 029 / 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.

C. Artikel, Jurnal, Internet dan Lainnya

CNN Indonesia, *Aceh dan Kesempatan Emas Yang Hilang*”, Diakses dari <http://m.cnnindonesia.com>, pada tanggal 25 Januari 2015 Pukul 22.00 WIB.

Hikmahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Iga Purwanti, Artikel “*Otonomi Khusus*”, <http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 2 Februari 2015 Pukul 16.10 WIB.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Ningrum Natasya, Sirait, 2003, *Mencermati Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Ridwan, Khairandy, 2003, *Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta.

Risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Yulianto, Syahyu, 2003., *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian*

Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

PPK-Bank Dunia, 2007, "*Laporan Pengembangan Manusia Aceh 2010 : Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*", UNDP Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan The Asia Foundation "*Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh : Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh 2008*", Jakarta 2009, hlm. 1. Diakses dari <http://www.kppod.org> pada tanggal 1 Maret 2015 Pukul 22.00 WIB.